

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan agar lebih merata. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital ataupun modal maupun sumber daya lainnya yang berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan (Todaro, 2000 dalam Astuti, dkk (2019)).

Tujuan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat serta kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja baru dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran serta menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penduduk untuk meningkatkan kemakmuran suatu masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki berbagai masalah sebagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara-negara

berkembang pada umumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu masalah pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), pengangguran menjadi masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak mudah dipahami.

Pengangguran pada umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Pengangguran seringkali menjadi permasalahan dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah masalah sosial lainnya (Naf'an, 2014 dalam Helvira dan Rizki (2020)).

Menurut Mankiw (2000) dalam Prawira (2018), seseorang dipandang menganggur jika dia sedang tidak bekerja untuk sementara, tengah mencari pekerjaan, atau menunggu tibanya waktu memulai pekerjaan baru. Pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada di suatu daerah, dapat menjadi beban masalah keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya kenaikan kriminalitas dan keresahan sosial. Adapun dampak yang diakibatkan oleh pengangguran begitu besar baik dari sisi sosial maupun ekonomi, oleh karena itu merupakan tugas penting pemerintah daerah untuk segera melakukan usaha dan kebijakan terkait dengan penanganan masalah pengangguran, terutama di Provinsi Jawa Barat.

Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan pembangunan

ekonomi dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan di suatu daerah. Permasalahan pengangguran dialami oleh seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Tabel 1-1 menyajikan data tentang jumlah pengangguran di enam provinsi Pulau Jawa tahun 2017-2019.

Tabel 1- 1Pengangguran di Enam Provinsi Pulau Jawa Tahun 2017-2019

Provinsi	2017 Agustus	2018 Agustus	2019 Agustus
Jawa Barat	1.839.428	1.877.431	1.929.515
DKI Jakarta	346.945	336.491	339.402
Jawa Tengah	823.938	815.083	818.276
DIY	64.019	75.032	71.486
Jawa Timur	838.496	847.224	835.130
Banten	519.563	494.868	489.825

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan tabel 1-1 diatas, dapat dilihat secara umum bahwa jumlah pengangguran yang terjadi di 6 Pulau Jawa dari tahun 2017-2019 menunjukkan angka yang naik turun dari masing-masing provinsi. Pengangguran tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Provinsi yang mengalami penurunan terjadi di provinsi Banten, sedangkan pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur mengalami fluktuasi. Tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat dan terus meningkat selama 3 tahun ini menjadi tugas untuk pemerintah setempat dalam menyelesaikan masalah terkait dengan pengangguran.

Salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap pengangguran adalah PDRB. PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Sasana, 2001 dalam Sukmaraga, 2011). PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengangguran dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta sehingga kesempatan kerja meningkat dan jumlah pengangguran di wilayah tersebut dapat berkurang (Todaro dan Smith, 2008 dalam Romhadhoni, dkk (2018)). Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Ditinjau dari segi belanja daerah, belanja daerah menurut Halim (2003), belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Kementerian Keuangan (2014) menjelaskan apabila pengeluaran pemerintah daerah benar-benar dikeluarkan untuk aktivitas yang produktif, maka akan mengakibatkan *multiplier effect* bagi daerah itu sendiri, dimana *multiplier effect* ini akan menstimulus kegiatan perekonomian ataupun sektor usaha lainnya yang kemudian dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Ketika pengeluaran pemerintah tinggi dan aktivitas ekonomi pada suatu daerah semakin

kompleks, diharapkan kesempatan kerja akan semakin tinggi pula, dan jumlah pengangguran bisa ditekan.

Masalah pengangguran juga erat kaitannya dengan inflasi. Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan kesempatan kerja. Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Feriyanto (2014) menjelaskan tentang inflasi melalui kurva Phillips, terdapat hubungan negatif antara inflasi dengan jumlah pengangguran yang didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Kenaikan permintaan agregat atas barang dan jasa disebabkan karena daya beli yang tinggi. Dimana daya beli masyarakat tinggi juga diikuti dengan pendapatan yang tinggi. Perusahaan meningkatkan produksinya yang dikarenakan tingginya permintaan dengan menambah tenaga kerja yang digunakan. Apabila penyerapan tenaga kerja semakin meningkat maka jumlah pengangguran akan berkurang. Menurut Manurung dan Rahardja, 2001 dalam Alamsyah, dkk (2015) ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi, diantaranya adalah indeks harga konsumen (*consumer price index*), indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), dan GNP deflator.

Selain inflasi, Mankiw (2003), mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi adanya pengangguran adalah kekakuan upah (*wage rigidity*) atau gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Penetapan upah minimum yang lebih rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi

pengangguran. Keynes menulis dalam "*The General Theory*" bahwa kenaikan dalam kesempatan kerja hanya bisa terjadi bila tingkat upah turun. Dengan meningkatnya tingkat upah berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau perluasan tenaga kerja dimasa yang akan datang. Dengan demikian jumlah pengangguran dapat berkurang. Penentuan tingkat upah harus sesuai dengan "hukum" ekonomi pasar tenaga kerja, yaitu bahwa tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan hal itu juga sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur sistem pengupahan dan upah minimum.

Permasalahan yang muncul akibat pengangguran terkadang tidak hanya sekedar muncul dan memberikan dampak sesaat namun juga memberikan dampak permasalahan yang sering kali berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Disisi lain, pengangguran juga menjadi salah satu tolak ukur ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh pdrb, belanja daerah, inflasi, dan upah minimum terhadap jumlah pengangguran di provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dengan demikian peneliti membuat penelitian berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap jumlah pengangguran di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap jumlah pengangguran di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah pengangguran di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap jumlah pengangguran di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengestimasi pengaruh produk domestik regional bruto terhadap jumlah pengangguran di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.
2. Mengestimasi pengaruh belanja daerah terhadap jumlah pengangguran di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.
3. Mengestimasi pengaruh inflasi terhadap jumlah pengangguran di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.
4. Mengestimasi pengaruh upah minimum terhadap jumlah pengangguran di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat

Bagi pemerintah daerah masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah Jawa Barat dalam menentukan arah kebijaksanaan untuk mengatasi masalah pengangguran sehingga nantinya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di Provinsi Jawa Barat.

2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Apabila pengangguran dapat berkurang dan semakin banyaknya orang yang bekerja, maka badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan kebijakan dengan menarik pajak dari hasil pajak penghasilan. Jika pajak penghasilan naik maka pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa barat juga akan mengalami kenaikan.

3. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijaksanaan melalui dinas tenaga kerja yang nantinya dapat memberi informasi lowongan kerja dan penempatan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta kebijakan yang diambil terkait dengan upah minimum yang berlaku bagi perusahaan.

4. Referensi penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi bagi peneliti serta tambahan informasi terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Metode Analisis Data

Guna menganalisis data sekunder mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat maka dipakai analisis regresi data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2012) menyatakan bahwa data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data *time series* (antar waktu) dengan data *cross section* (antar individu dan ruang). Adapun persamaan estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LOG(UEMP)}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOG(PDRBK)}_{it} + \beta_2 \text{LOG(BD)}_{it} + \beta_3 \text{INF}_{it} + \beta_4 \text{LOG(UMK)}_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

UEMP	= Jumlah pengangguran (jiwa)
PDRBK	= Produk domestik regional bruto konstan (milliar rupiah)
BD	= Belanja daerah (ribu rupiah)
INF	= Inflasi (persen)
UMK	= Upah minimum kabupaten atau kota (rupiah)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi variabel bebas
ε	= <i>Error term</i>
i	= Kabupaten atau Kota
t	= Tahun